

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



Jl. Timor Raya Km 32 Kupang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kupang, 13 Januari 2021
Kepala BPTP NTT,

Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 197203161999031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 13 Januari 2021
Kepala BPTP NTT,

Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 197203161999031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp357.862.100,00 atau mencapai 129,22% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp276.930.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp19.477.891.401,00 atau mencapai 98,06% dari alokasi anggaran sebesar Rp19.863.093.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp370.382.968.392,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp9.780.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp370.270.532.917,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp102.655.475,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp470.907,00 dan Rp370.382.497.485,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp353.006.042,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp22.008.961.427,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-21.655.955.385,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp124.226.058,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-21.531.729.327,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp372.794.197.511,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-21.531.729.327,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi

Antar Entitas sebesar Rp19.120.029.301,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp370.382.497.485,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) NTT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	276.930.000,00	357.862.100,00	129,22	173.049.289,00
Jumlah Pendapatan		276.930.000,00	357.862.100,00	129,22	173.049.289,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	9.150.600.000,00	8.918.962.498,00	97,47	9.604.504.327,00
Belanja Barang	B.4.	10.538.245.000,00	10.384.748.903,00	98,54	4.288.016.086,00
Belanja Modal	B.5.	174.248.000,00	174.180.000,00	99,96	259.987.000,00
Jumlah Belanja		19.863.093.000,00	19.477.891.401,00	98,06	14.152.507.413,00

II. NERACA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) NTT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	9.780.000,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		9.780.000,00	0,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	334.539.404.000,00	334.539.404.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	13.638.601.923,00	13.614.169.923,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	40.562.882.690,00	40.403.134.690,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.844.213.634,00	2.844.213.634,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	68.424.025,00	68.424.025,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0,00	10.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-21.382.993.355,00	-18.788.909.294,00
Jumlah Aset Tetap		370.270.532.917,00	372.690.436.978,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	17.573.573,00	17.573.573,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	348.909.478,00	348.909.478,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-269.942.576,00	-260.329.443,00
Jumlah Aset Lainnya		96.540.475,00	106.153.608,00
Jumlah Aset		370.376.853.392,00	372.796.590.586,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	1.809.016,00	2.393.075,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.809.016,00	2.393.075,00
Jumlah Kewajiban		1.809.016,00	2.393.075,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	370.375.044.376,00	372.794.197.511,00
Jumlah Ekuitas		370.375.044.376,00	372.794.197.511,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		370.376.853.392,00	372.796.590.586,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) NTT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	353.006.042,00	157.792.889,00
JUMLAH PENDAPATAN		353.006.042,00	157.792.889,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	8.917.040.330,00	9.603.223.300,00
Beban Persediaan	D.3.	550.497.800,00	716.003.400,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4.983.321.402,00	2.041.936.802,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.082.537.942,00	1.411.726.607,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.077.605.949,00	507.484.277,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	1.800.375.810,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2.597.582.194,00	2.944.226.694,00
JUMLAH BEBAN		22.008.961.427,00	17.224.601.080,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-21.655.955.385,00	-17.066.808.191,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	124.226.058,00	264.021.400,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		124.226.058,00	264.021.400,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-21.531.729.327,00	-16.802.786.791,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) NTT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	372.794.197.511,00	377.819.639.511,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-21.531.729.327,00	-16.802.786.791,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	-2.202.021.630,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0,00	-3.975.559.380,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0,00	1.773.537.750,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	19.120.029.301,00	13.979.366.421,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-2.411.700.026,00	-5.025.442.000,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	370.382.497.485,00	372.794.197.511,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	276.930.000,00	276.930.000,00
Jumlah Pendapatan	276.930.000,00	276.930.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.356.600.000,00	9.150.600.000,00
Belanja Barang Operasional	957.579.000,00	932.479.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.644.070.000,00	3.789.755.000,00
Belanja Barang Persediaan	1.526.630.000,00	451.590.000,00
Belanja Jasa	347.400.000,00	400.500.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.075.021.000,00	1.075.021.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.549.300.000,00	2.088.900.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	1.800.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	24.500.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.748.000,00
Jumlah Belanja	18.656.600.000,00	19.863.093.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp357.862.100,00 atau mencapai 129,22% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp276.930.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0,00	30.930.000,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	276.930.000,00	114.465.542,00	41,33
Pendapatan Lain-Lain	0,00	4.856.058,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	207.610.500,00	0,00
Jumlah	276.930.000,00	357.862.100,00	129,22

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 106,80% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	30.930.000,00	7.647.000,00	304,47
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	114.465.542,00	27.285.722,00	319,51
Pendapatan Denda	0,00	8.702.500,00	-100,00
Pendapatan Lain-Lain	4.856.058,00	15.256.567,00	-68,17
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	207.610.500,00	114.157.500,00	81,86
Jumlah	357.862.100,00	173.049.289,00	106,80

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp19.477.891.401,00 atau 98,06% dari anggaran belanja sebesar Rp19.863.093.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	9.150.600.000,00	8.923.277.999,00	97,52
Belanja Barang	10.538.245.000,00	10.384.748.903,00	98,54
Belanja Modal	174.248.000,00	174.180.000,00	99,96
Total Belanja Kotor	19.863.093.000,00	19.482.206.902,00	98,08
Pengembalian Belanja		-4.315.501,00	0,00
Total Belanja	19.863.093.000,00	19.477.891.401,00	98,06

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 37,63% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain: Adanya Program Pemerintah untuk Peningkatan ekonomi Nasional dalam Penanganan Pandemi.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	8.918.962.498,00	9.604.504.327,00	-7,14
Belanja Barang	10.384.748.903,00	4.288.016.086,00	142,18
Belanja Modal	174.180.000,00	259.987.000,00	-33,00
Total Belanja	19.477.891.401,00	14.152.507.413,00	37,63

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.918.962.498,00 dan Rp9.604.504.327,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -7,14% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Adanya 8 ASN yang memasuki Masa Purna Bakti Tahun 2021 Yaitu :

1. Ir. Umar Utina
2. Yeremias Bombo, SP
3. Thomas Alik
4. Teodorus Dando
5. Hilarius Ceme
6. Thomas Keo
7. Yoseph Tanasib
8. Muhamad Kasim Rumbory

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.923.277.999,00	9.604.505.037,00	-7,09
Jumlah Belanja Kotor	8.923.277.999,00	9.604.505.037,00	-7,09
Pengembalian Belanja Pegawai	-4.315.501,00	-710,00	607.717,04
Jumlah Belanja	8.918.962.498,00	9.604.504.327,00	-7,14

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.384.748.903,00 dan Rp4.288.016.086,00. Realisasi

belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 142,18% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Adanya Program Pemerintah untuk Peningkatan ekonomi Nasional dalam Penanganan Pandemi.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	908.280.073,00	1.110.940.306,00	-18,24
Belanja Barang Non Operasional	3.720.485.035,00	576.624.350,00	545,22
Belanja Barang Persediaan	449.896.000,00	354.024.400,00	27,08
Belanja Jasa	354.556.294,00	345.396.146,00	2,65
Belanja Pemeliharaan	1.074.269.742,00	1.393.546.607,00	-22,91
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.077.605.949,00	523.793.977,00	296,65
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.799.655.810,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	10.384.748.903,00	4.304.325.786,00	141,26
Pengembalian Belanja Barang	0,00	-16.309.700,00	-100,00
Jumlah Belanja	10.384.748.903,00	4.288.016.086,00	142,18

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp174.180.000,00 dan Rp259.987.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -33,00% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain : Karena Penurunan Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.432.000,00	49.987.000,00	-51,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.748.000,00	210.000.000,00	-28,69
Jumlah Belanja Kotor	174.180.000,00	259.987.000,00	-33,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	174.180.000,00	259.987.000,00	-33,00

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp24.432.000,00 dan Rp49.987.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -51,12% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh Karena Penurunan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.432.000,00	49.987.000,00	-51,12
Jumlah Belanja Kotor	24.432.000,00	49.987.000,00	-51,12
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	24.432.000,00	49.987.000,00	-51,12

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp149.748.000,00 dan Rp210.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -28,69% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh Karena Penurunan Anggaran Belanja Modal Gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2021

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.748.000,00	210.000.000,00	-28,69
Jumlah Belanja Kotor	149.748.000,00	210.000.000,00	-28,69
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	149.748.000,00	210.000.000,00	-28,69

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.780.000,00 dan Rp0,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Bahan Baku	9.780.000,00	0,00
Jumlah	9.780.000,00	0,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp334.539.404.000,00 dan Rp334.539.404.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.638.601.923,00 dan Rp13.614.169.923,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	13.614.169.923,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	24.432.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	13.638.601.923,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-11.013.286.036,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.625.315.887,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Mutasi penambahan melalui pembelian Alat Pencacah Hijauan seharga Rp. 24.432.000,-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp40.562.882.690,00 dan Rp40.403.134.690,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	40.403.134.690,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	52.947.000,00
Pengembangan Melalui KDP	106.801.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	40.562.882.690,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-9.113.098.689,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	31.449.784.001,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Mutasi penambahan melalui Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp. 52.947.000,-
2. Mutasi penambahan melalui Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp. 106.801.000.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.844.213.634,00 dan Rp2.844.213.634,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp68.424.025,00 dan Rp68.424.025,00.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.000.000,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-21.382.993.355,00 dan Rp-18.788.909.294,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	13.638.601.923,00	-11.013.286.036,00	2.625.315.887,00
2.	Gedung dan Bangunan	40.562.882.690,00	-9.113.098.689,00	31.449.784.001,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.844.213.634,00	-1.256.608.630,00	1.587.605.004,00
4.	Aset Tetap Lainnya	68.424.025,00	0,00	68.424.025,00
Akumulasi Penyusutan		57.114.122.272,00	-21.382.993.355,00	35.731.128.917,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17.573.573,00 dan Rp17.573.573,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Paten	800.000,00
Software	16.773.573,00
Jumlah	17.573.573,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp348.909.478,00 dan Rp348.909.478,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik

Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-263.827.576,00 dan Rp-260.329.443,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	17.573.573,00	-10.658.573,00	6.915.000,00
2.	Aset Lain-lain	348.909.478,00	-252.809.003,00	96.100.475,00
Akumulasi Penyusutan		366.483.051,00	-263.827.576,00	102.655.475,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.809.016,00 dan Rp2.393.075,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.809.016,00	2.393.075,00
Jumlah	1.809.016,00	2.393.075,00

Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Tahun 2021 Sebesar Rp. 1.809.016,00 adalah Pembayaran Kekurangan gaji Kenaikan Pangkat Pengabdian An. Yeremias Bombo, SP, dkk (7 Orang) Untuk bulan Agustus s/d Desember 2021 Sebesar Rp. 1.586.501,00 dan Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat Pengabdian An. Ir. Umar Utina untuk bulan Oktober 2021 Sebesar Rp. 222.515,00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp370.382.497.485,00 dan Rp372.794.197.511,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp353.006.042,00 dan Rp157.792.889,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	167,00	-100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	8.702.500,00	-100,00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	207.610.500,00	114.157.500,00	81,86
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	30.930.000,00	7.647.000,00	304,47
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	87.620.000,00	13.995.000,00	526,08
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	22.045.542,00	13.290.722,00	65,87
Jumlah	353.006.042,00	157.792.889,00	123,71

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.917.040.330,00 dan Rp9.603.223.300,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	6.066.049.332,00	6.532.825.293,00	-7,15
Beban Pembulatan Gaji PNS	87.667,00	91.312,00	-3,99
Beban Tunj. Anak PNS	146.537.988,00	164.255.016,00	-10,79
Beban Tunj. Beras PNS	353.119.920,00	335.666.700,00	5,20

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Fungsional PNS	726.839.790,00	703.970.000,00	3,25
Beban Tunj. PPh PNS	40.491.853,00	39.254.889,00	3,15
Beban Tunj. Struktural PNS	26.820.000,00	23.040.000,00	16,41
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	453.662.780,00	494.304.090,00	-8,22
Beban Tunjangan Umum PNS	194.520.000,00	230.900.000,00	-15,76
Beban Uang Makan PNS	908.911.000,00	1.078.916.000,00	-15,76
Jumlah	8.917.040.330,00	9.603.223.300,00	-7,15

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp550.497.800,00 dan Rp716.003.400,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	280.581.000,00	442.100.250,00	-36,53
Beban Persediaan konsumsi	175.704.625,00	221.426.150,00	-20,65
Beban persediaan lainnya	94.212.175,00	52.477.000,00	79,53
Jumlah	550.497.800,00	716.003.400,00	-23,12

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.983.321.402,00 dan Rp2.041.936.802,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	8.976.000,00	-100,00
Beban Bahan	282.400.900,00	122.741.000,00	130,08
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.040.469.635,00	0,00	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.009.218.500,00	273.512.150,00	268,98
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	34.845.501,00	458.868.001,00	-92,41
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	120.600.000,00	118.800.000,00	1,52
Beban Honor Output Kegiatan	388.396.000,00	180.371.200,00	115,33
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	75.186.000,00	69.025.777,00	8,92
Beban Jasa Profesi	0,00	1.600.000,00	-100,00
Beban Keperluan Perkantoran	752.834.572,00	533.272.305,00	41,17
Beban Langganan Air	5.745.400,00	4.632.800,00	24,02
Beban Langganan Listrik	237.670.144,00	236.685.969,00	0,42
Beban Langganan Telepon	35.954.750,00	33.451.600,00	7,48
Jumlah	4.983.321.402,00	2.041.936.802,00	144,05

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.082.537.942,00 dan Rp1.411.726.607,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	440.343.210,00	641.271.080,00	-31,33
Beban Pemeliharaan Lainnya	309.266.505,00	324.310.902,00	-4,64
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	315.720.027,00	410.978.225,00	-23,18
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.940.000,00	16.986.400,00	-47,37
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.748.200,00	17.955.000,00	-56,85
Beban Persediaan suku cadang	520.000,00	225.000,00	131,11
Jumlah	1.082.537.942,00	1.411.726.607,00	-23,32

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.077.605.949,00 dan Rp507.484.277,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	908.263.199,00	312.531.577,00	190,61
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1.011.854.150,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	157.488.600,00	53.890.000,00	192,24
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	141.062.700,00	-100,00
Jumlah	2.077.605.949,00	507.484.277,00	309,39

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.800.375.810,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.800.375.810,00	0,00	0,00
Jumlah	1.800.375.810,00	0,00	0,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar

Rp2.597.582.194,00 dan Rp2.944.226.694,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Paten	80.000,00	80.000,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.630.382.613,00	1.650.873.290,00	-1,24
Beban Penyusutan Irigasi	52.533.677,00	18.630.536,00	181,98
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	71.624.060,00	268.514.583,00	-73,33
Beban Penyusutan Jaringan	18.498.552,00	19.771.184,00	-6,44
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.418.133,00	29.850.020,00	-88,55
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	821.045.159,00	956.507.081,00	-14,16
Jumlah	2.597.582.194,00	2.944.226.694,00	-11,77

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	119.370.000,00	248.765.000,00	-52,02
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	880.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.856.058,00	14.376.400,00	-66,22
Jumlah	124.226.058,00	264.021.400,00	-52,95

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp372.794.197.511,00 dan Rp377.819.639.511,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-21.531.729.327,00 dan Rp-16.802.786.791,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-2.202.021.630,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-3.975.559.380,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.773.537.750,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.120.029.301,00 dan Rp13.979.366.421,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	19.477.891.401,00
Diterima dari Entitas Lain	-357.862.100,00
Jumlah	19.120.029.301,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-357.862.100,00 sedangkan DKEL sebesar Rp19.477.891.401,00.

E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-91.703,00.

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1.	Nama Pemberi Hibah 1	Barang/Jasa/Lainnya	00,00
Jumlah Nilai Hibah			0,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-2.411.700.026,00 dan Rp-5.025.442.000,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

.

1. Kronologis Revisi Anggaran (DIPA/POK) BPTP NTT Tahun Anggaran 2021

No	Revisi ke-	Tanggal	Narasi	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	DIPA Awal	23 November 2020		18.656.600.000
2	Revisi ke-1	17 Februari 2021	Penambahan PAGU untuk kegiatan Strategis	18.893.848.000
3	Revisi ke-2	26 Maret 2021	Penambahan PAGU DIPA untuk kegiatan PEN	20.643.848.000
4	Revisi ke-3	10 Mei 2021	Perbaikan Judul dan Realokasi Anggaran	20.643.848.000
5	Revisi ke-4	18 Juni 2021	Penghapusan Blokir (bintang) pada Akun 526	20.643.848.000
6	Revisi ke-5	21 juli 2021	Refocusing Pengurangan PAGU untuk penanggulangan Covid-19	20.574.093.000
7	Revisi ke-6	05 Agustus 2021	Refocusing dan Realokasi Pengurangan Anggaran Tahap 4	19.368.093.000
8	Revisi ke-7	26 Agustus 2021	Penambahan PAGU dan Realokasi ABT dari Non PEN menjadi PEN sebesar 900 juta	19.863.093.000
9	Revisi ke-8	28 Oktober 2021	Realokasi PAGU Akun Bahan menjadi Perjalanan Dinas	19.863.093.000

2. Adanya Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran pada bulan September 2021 Sesuai SK. No.511/Kpts/KP.230/A/09/2021 Tanggal 10 September 2021 dari Pejabat Lama Dr. Procula Rudlof Matitaputty, S.Pt, M.Si ke Pejabat baru Dr. Aser Rouw, S.P, M.Si

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19 TINGKAT SATUAN KERJA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	60,000,000	34,900,000	34,845,501	0	34,845,501	99.84	54,499
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	60,000,000	34,900,000	34,845,501	0	34,845,501	99.84	54,499
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,049,910,000	2,040,469,635	0	2,040,469,635	99.54	9,440,365
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	2,049,910,000	2,040,469,635	0	2,040,469,635	99.54	9,440,365
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	32,490,000	32,177,700	0	32,177,700	99.04	312,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	32,490,000	32,177,700	0	32,177,700	99.04	312,300
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	28,400,000	98,500,000	75,186,000	0	75,186,000	76.33	23,314,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	28,400,000	98,500,000	75,186,000	0	75,186,000	76.33	23,314,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,017,600,000	1,011,854,150	0	1,011,854,150	99.44	5,745,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	1,017,600,000	1,011,854,150	0	1,011,854,150	99.44	5,745,850
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	88,400,000	3,233,400,000	3,194,532,986	0	3,194,532,986	98.8	38,867,014
	JUMLAH BELANJA	88,400,000	3,233,400,000	3,194,532,986	0	3,194,532,986	98.8	38,867,014

KEMENTERIAN PERTANIAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTT SURAT PERINTAH MEMBAYAR													
Nomor 00002A	Tanggal 06-Jan-2022												
Halaman 1 dari 2													
Kuasa Bendahara Umum KPPN Kupang (039)													
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah	Rp 1.482.600,00												
**** SATU JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU ENAM RATUS RUPIAH ****													
Tahun Anggaran 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-018.09.2.567783/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Jenis Tagihan : KEKURANGAN GAJI Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D												
PENGELUARAN	JUMLAH UANG												
567783.039.511111.01809WA.1809EBA.A000000001.00000.2.2400.2.000000.000000	1.438.100,00												
567783.039.511119.01809WA.1809EBA.A000000001.00000.2.2400.2.000000.000000	481,00												
567783.039.511121.01809WA.1809EBA.A000000001.00000.2.2400.2.000000.000000	98.240,00												
567783.039.511122.01809WA.1809EBA.A000000001.00000.2.2400.2.000000.000000	19.680,00												
567783.039.511151.01809WA.1809EBA.A000000001.00000.2.2400.2.000000.000000	30.000,00												
Jumlah Pengeluaran	1.586.501,00												
POTONGAN	JUMLAH UANG												
440780.999.811132.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999148.000000	88.025,00												
440780.999.811135.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999148.000000	15.857,00												
567783.039.425911.0180900.0000000.0000000000.00000.2.2401.2.000000.000000	19,00												
Jumlah Potongan	103.901,00												
TOTAL PEMBAYARAN	1.482.600,00												
<p>Kepada:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nomor : 827168</td> <td>Bank / Pos : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>Nama Supplier : BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTT</td> <td>Rekening : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>NPWP1 : 000260141922000</td> <td>Nama Pemilik : TERLAMPIR</td> </tr> <tr> <td>NPWP2 :</td> <td>Uraian : Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat Pengabdian an. Yermias Bombo, SP, dkk (7 Orang) untuk bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021</td> </tr> <tr> <td>NOP :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT : Jl. Timor Raya Km.32 Naibonat</td> <td></td> </tr> </table>		Nomor : 827168	Bank / Pos : TERLAMPIR	Nama Supplier : BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTT	Rekening : TERLAMPIR	NPWP1 : 000260141922000	Nama Pemilik : TERLAMPIR	NPWP2 :	Uraian : Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat Pengabdian an. Yermias Bombo, SP, dkk (7 Orang) untuk bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021	NOP :		ALAMAT : Jl. Timor Raya Km.32 Naibonat	
Nomor : 827168	Bank / Pos : TERLAMPIR												
Nama Supplier : BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTT	Rekening : TERLAMPIR												
NPWP1 : 000260141922000	Nama Pemilik : TERLAMPIR												
NPWP2 :	Uraian : Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat Pengabdian an. Yermias Bombo, SP, dkk (7 Orang) untuk bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021												
NOP :													
ALAMAT : Jl. Timor Raya Km.32 Naibonat													
<p>Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM</p> <p style="text-align: right;">Kupang, 6 Januari 2022 Pejabat Pengeluaran Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT</p> <div style="text-align: center;">  John B. Sendow, S.S.T., M.Sc. NIP 197412142005011001 </div> <p>Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM</p>													

KEMENTERIAN PERTANIAN BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTT SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00003A	Tanggal 11-Jan-2022	Halaman 1 dari 2
Kuasa Bendahara Umum KPPN Kupang (039)		
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 202.900,00		
**** DUA RATUS DUA RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH ****		
Tahun Anggaran : 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-018.09.2.567783/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022		Jenis Tagihan : KEKURANGAN GAJI Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
567783.039.511111.01809WA.1809E.BA.A000000001.00000.2.2400.2.000000.000000		190.700,00
567783.039.511110.01809WA.1809E.BA.A000000001.00000.2.2400.2.000000.000000		117,00
567783.039.511121.01809WA.1809E.BA.A000000001.00000.2.2400.2.000000.000000		19.070,00
567783.039.511122.01809WA.1809E.BA.A000000001.00000.2.2400.2.000000.000000		7.628,00
567783.039.511151.01809WA.1809E.BA.A000000001.00000.2.2400.2.000000.000000		5.000,00
Jumlah Pengeluaran		222.515,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
440780.999.811132.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999148.000000		17.392,00
440780.999.811135.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999148.000000		2.223,00
Jumlah Potongan		19.615,00
TOTAL PEMBAYARAN		202.900,00
Kepada: Nomor : 827168 Nama Supplier : BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTT NPWP1 : 000260141922000 NPWP2 : NOP : ALAMAT : Jl. Timor Raya Km.32 Naibonat		
Bank / Pos : TERLAMPIR Rekening : TERLAMPIR Nama Pemilik : TERLAMPIR Uraian : Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Ir. Umar Utina bulan Oktober Tahun 2021.		
Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM		Kupang, 11 Januari 2022 a.n. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Pejabat Penandatangan SPM
Pejabat yang ditunjuk dan isi yang terdapat dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM		 Christofel John D. Gondow, S.S.T., M.Sc. NIP. 197412142005011001